

**KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran
2014-2018)**



Skripsi Oleh:

**ARISTA R. HARRIS
01031181520035
AKUNTANSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014-2018)

Disusun Oleh :

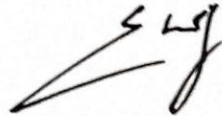
Nama : Arista R. Harris
NIM : 01031181520035
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua



Tanggal: 09-01-2020

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA

NIP 19660820 199402 2 001

Anggota



Tanggal: 20-12-2019

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19860513 201504 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014-2018)

Disusun Oleh :

Nama : Arista R. Harris
NIM : 01031181520035
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
BidangKajian : Perpajakan

Telah diuji dalamUjian Komprehensif pada tanggal 14 Januari 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 14 Januari 2020

Ketua



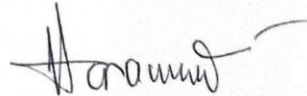
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA
NIP 19660820 199402 2 001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19860513 201504 2 002

Anggota



Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak., CA
NIP 19550113 199003 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

**Tertinggal Dari Teman Satu Angkatan Bukanlah Sebuah Kegagalan.
Menyerah Adalah Sebuah Kegagalan.**

**Jangan Pernah Bandingkan Pencapaian Kamu Dengan Pencapaian Orang
Lain, Tapi Bandingkanlah Pencapaian Kamu Dengan Pencapaian
Sebelumnya.**

**Dalam Setiap Peristiwa, Hikmah Itu Selalu Ada.
Percayalah.**

Kupersembahkan untuk:

- **Orang Tua Tercinta**
- **Saudara-saudara
Kebangganku**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arista Ramadhana Harris

NIM : 01021181520035

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014-2018).

Pembimbing :

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA

Anggota 1 : Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

Anggota 2 : Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak., CA

Tanggal Ujian : 14 Januari 2020

Adalah benar karya tulis sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan dalam sumber.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, maka saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 14 Januari 2020

Pembuat Pernyataan



Arista R. Harris

NIM. 01031181520035

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, “Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan TerimaKasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan juga kelancaran serta nikmat yang tiada henti dalam proses pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

5. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
6. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih karena telah memberikan pengarahan serta bantuan kepada Saya, juga mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak **Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Penguji.
8. Ibu **Dra. Kencana Dewi, M.M., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak **Agil Novriansa dan Bapak Farhan** telah menjadi Dosen Koordinator sekaligus kakak. Tempat kami konsultasi tentang organisasi maupun perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang telah memberikan data kepada penulis.
12. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
13. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, semangat, motivasi, kasih sayang, serta doa tulus yang tiada henti kepada penulis.

14. Saudara-saudaraku **Aditya Riseta Harris** dan **Aidil Fitri Harris** yang telah memberikan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.
15. Keluarga besar **Kacang (Fatur, Daus, Vallian, Eko, Kevin, Ajik, Acal, Jeje, Balqis, Tiara, Desi dan Nada)** yang telah menjadi teman sekaligus saudara sejak awal masa perkuliahan sampai kapanpun.
16. Keluarga besar **Kancut's (Amat, Topek, Arep, Jerry, Kiki, Diki, Edo, Edok, Ridho, Goy, Andrak, Mol, Luthfi, Acak, Rendy, Alem)** yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan masa studi, juga mengajarkan apa itu arti keluarga yang sebenarnya. Keluarga tidak harus pertalian darah, tapi juga pertalian hati.
17. Keluarga besar **Djoempalagi (Kak Al, Kak Wahyu, Kak Ginda, Kak Taqin, Kak Sapta, Kak Dije, Kak Aliah, Kak Diah, Kak Ika, Daus, Apit, Bayu, Hariz, Syukri, Tigas, Rakas, Rizki, Afif dll)** yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dibarengi dengan canda tawa.
18. Keluarga besar **Lacopmai (One Thux, Peg Peg, Memed, dan Ndut)** yang telah menjadi teman terbaik, juga memberikan semangat kepada penulis.
19. Teman-temanku sekaligus sahabat **Abizar, Ayu, Naufal, Dia, Tian, Aula** yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis.
20. Teman satu tongkrongan **Valiando, Daus Ceking, Zio, Dede, Isan Kudu, Ikram dan Deo.**
21. Teman mabar sekaligus teman ngobrol **Irak, Fatur, Syesye, Nada, Putri, Mutik, Taufik, Zora, Yiyik, Vivi, Vali, Daus, Isan, Renaldi, Sukri, Tigas,**

hariz, Bayu dll. Berkat kalian stress sehabis menulis skripsi seketika hilang “ga mabar ga asik”.

22. **Organisasi Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA)**. Terimakasih telah memberikan banyak pengalaman, teman, dan apapun itu.
23. **BPH IMA Kabinet Utama (Stella, Eko, Fatur dan Asep)**. Bangga pernah jadi bagian dari kalian.
24. **Avengers Team (Dekyak, Renaldi, dan Kevin)** yang pernah menemani juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Transportasi umum seperti **Trans Musi, Damri, Bis Kuning sampai Angkot Biru** yang pernah mengantar penulis untuk menuntut ilmu.
26. Beasiswa **PT. BFI Finance** yang telah membantu membiayai perkuliahan penulis.
27. Teman seperjuangan satu bimbingan, terimakasih telah kebersamai perjuangan ini, kawan. Sukses selalu!
28. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015 atas kenangan, pengalaman, bantuan, canda tawa dan kerjasama selama ini. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
29. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai masukan untuk

perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak.

Palembang, 14 Januari 2020



Arista R. Harris

01031181520035

x

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Arista R. Harris

NIM : 01031181520035

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 14 Januari 2020

Ketua



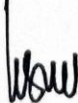
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA NIP 19660820 199402 2 001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2014-2018)

Oleh:

Arista R. Harris

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi serta efektivitas penerimaan asli daerah yaitu pada sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa laporan yang terkait dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori sangat baik karena melebihi angka diatas 50%. Sedangkan, efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu 104.39% dan dikategorikan dalam kriteria sangat efektif karena berada dalam rentang lebih dari 100%.

Kata kunci: Pajak Daerah, Kontribusi, Efektivitas, Otonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP 19660820 199402 2 001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA
NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

**Contribution and Effectiveness of Local Taxes on Regional Original Revenue
of Palembang City South Sumatra Province
(Case Study on The Regional Government of Palembang City in The 2014-
2018 Fiscal Year)**

By :

Arista R. Harris
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA

This study aims to analyze the contribution and effectiveness of local revenue, namely the local tax sector on Regional Original Revenue (ROR) of the City of Palembang, South Sumatra Province. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The data used in this research is secondary data. Secondary data in the form of reports related to the target and realization of the Palembang regional tax revenue in South Sumatra Province. The results showed that the contribution of local taxes to the Regional Original Revenue (ROR) of the City of Palembang, South Sumatra Province is in the very good category because it exceeds the figure above 50%. Meanwhile, the effectiveness of local tax on Regional Original Revenue (ROR) of Palembang City in South Sumatra Province is 104,39% and categorized as very effective criteria because it is in the range of more than 100%.

Keyword : Regional Tax, Contribution, Effectiveness, Regional Aunotomy and Regional Original Revenue (ROR).

Advisor



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP 19660820 199402 2 001

Vice Advisor



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA
NIP 19860513 201504 2 002

Acknowledge,
Head of Accounting Program



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Arista Ramadhana Harris
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 11 Desember 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Perumahan Griya Buana Indah 3 Blok C Nomor 20
Alamat Email : arista.ramadhana11@gmail.com
Nomor Handphone : 0822-2717-3849



PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD Negeri Merdeka 1 Kota Bogor
SMP : MTS Al-Ghazaly Kota Bogor
SMA : SMA YPI Tunas Bangsa Kota Palembang
S1 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu di Graha Akuntan Sumatera Selatan (Oktober 2019-Januari 2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2017-2018 : Wakil Bidang Akademik Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

Error! Reference source not found.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Klasifikasi Tingkat Kontribusi.....	42
Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	42
Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Daerah	44
Tabel 4.2 Efektivitas Pajak Daerah.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah	48
Gambar 4.2 Analisis Efektivitas Pajak daerah.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting sekali dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu agar upaya pemerataan pembangunan diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, berkembang dan terpencil perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya pembangunan wilayah secara nasional.

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah dalam terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah

diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk didalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Walakandou (2013), untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Dengan demikian, daerah diberi kebebasan untuk mandiri dalam mengelola asetnya sendiri melalui pendapatan yang dipungut di wilayahnya untuk memenuhi belanja dan kebutuhan daerah selain bantuan dari pusat.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan tentang penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan. Hal ini merupakan

konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Asas ini merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi daerah adalah daerah diharapkan mampu mengelola segala permasalahan daerahnya secara lebih mandiri atau otonom, termasuk pula dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran daerah. Harapannya bahwa pemerintah daerah mampu secara lebih otonom dalam menggali dan mengelola kekayaan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat yang pada akhirnya dapat dioptimalkan pada pembangunan daerah.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Pemerintah pusat menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan pemerintah

daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan belanja daerah masih tergolong kecil, masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan PAD. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

Penerimaan daerah pada sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan berbagai alternatif penerimaan daerah, undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak secara umum yang memungut adalah dari pihak pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah dari pihak pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut diwilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut diwilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat. Menurut Agoes (2017), pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *bujeter* yaitu fungsi mengatur.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan undang-undang tersebut maka kabupaten/kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Menurut Wulandari dan Iryani (2018), pajak daerah merupakan sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak daerah yang biasa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung potensi daerah tersebut.

Pajak bagi pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*). Pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terlebih di era otonomi daerah dimana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengatur (*regulatory*) dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah (djpk.kemenkeu.go.id).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD

yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, seperti membiayai administrasi pemerintahan, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintahan daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri sebagai pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Berikut ini adalah rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Prov. Sumsel Tahun 2014-2018 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Penerimaan	%	Penerimaan	%	Penerimaan	%	Penerimaan	%	Penerimaan	%
1.Pajak Daerah	463.574.599	64	479.112.889	65	536.552.681	69	680.012.762	62	721.012.771	75
2.Retribusi Daerah	85.154.048	12	75.664.031	11	74.207.984	10	59.805.678	5	48.055.940	5
3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.021.442	4	34.503.218	4	50.361.859	6	61.860.027	6	62.318.561	7
4.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	151.373.216	20	145.540.055	20	116.271.504	15	290.026.147	27	121.870.338	13
JUMLAH	728.123.306	100	734.820.204	100	777.394.030	100	1.091.704.605	100	953.257.612	100

Sumber: BPKAD Kota Palembang Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, masing-masing ada yang naik setiap tahunnya juga ada yang turun jumlah penerimaan disetiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pajak daerah memberikan penerimaan 75% dari total PAD, terlihat pada tabel 1.1 bahwa pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pemerintah Daerah Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada, salah satunya dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Kota Palembang adalah salah satu dari 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Banyak potensi daerah yang dapat digali dari Kota Palembang dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD di Kota Palembang, maka pihak Pemerintah Daerah Kota Palembang harus berupaya untuk meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada, salah satunya dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat :

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
2. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan dan masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Serta untuk mengetahui bagaimana tingkat kontribusi penerimaan, efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman tentang fenomena perpajakan yang terjadi, terutama tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD. Manfaat untuk pembaca diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan terkait dengan penelitian, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan mengenai studi kepustakaan, yaitu teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data disertai dengan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2003. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2017. Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Edisi 3.
- Fauziah, I., Husnaini, A dan Shobaruddin. 2014. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Perpajakan*. Vol 3(1):1-3.
- Handoko, Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah*. Volume I, No.I 2013.
- Kadajmiko.2002. Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Hal 77.
- Lasari, N. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*. Vol 8(1):1.
- Lohonauman, I. 2016. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situro. *Jurnal Emba*. Vol 4(1):1.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marita, N.M. dan Suardana, K.A. 2018. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 14.1:53-65.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Octovido, I., Sudjana, N dan Azizah, D. 2014. Analisis efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Hasil Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 15(1):1.
- Pebriani, N., Sujana, E dan Purnamawati, I. 2017. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 7(1):1.

Riduansyah, M. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara, Sosial Humaniora*. Vol 7(2):1.

Romanda, Candra. 2015. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No 1 Tahun 2015.

Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wulandari, Phaureula Artha dan Iryanie, Emy. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[www.djpk.kemenkeu .go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

www.pajak.go.id